

**STUDI ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG
KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS
MURTAD**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH:

NAMA : ARIF RAHMAN
NIM : 2103160
JURUSAN : AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

NIP. 150 216 809

Jl. Kanguru III/15A Semarang

H. Ahmad Izzuddin, M.Ag

NIP. 150 290 930

Bukit Bringin Lestari Barat Blok C/131

Wonosari Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Arif Rahman

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Arif Rahman

NIM : 2103160

Judul Skripsi : Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. muhyiddin, M.Ag.

NIP. 150 216 809

H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

NIP. 150 290 930

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Raya Ngaliyan Boja Km.02 Semarang 50159 Tlp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Arif Rahman
Nomor Induk : 2103160
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / al- Ahwal al- Syakhsiyah
Judul skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH
TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA
WARIS DARI MUWARIS MURTAD**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

29 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2006/2007 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 7 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Hj. Rr. Sugiarti, S.H., M.H
NIP. 150 104180

H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 150 290 930

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 150 198 821

Dra. Nur Huda., M.Ag
NIP. 150 267757

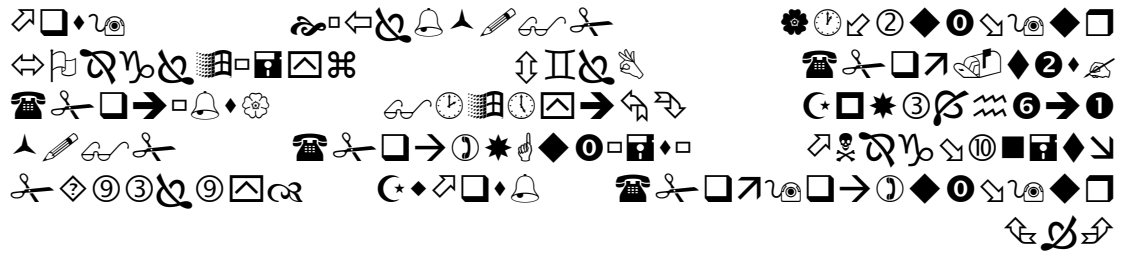
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 150 216 809

H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 150 290 930

MOTTO



Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.)” *

*Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Diponegoro, 1981.
hlm. 62.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran- pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2008

Deklarator

Arif Rahman
2103160

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa membesarkan dengan segala
pengorbanannya*

*do'a dan restumu adalah hidup ananda
meniti langkah menuju ridho-nya,*

Bapak dan Ibu mertua yang selalu mendukung dan memberi semangat

Istri dan anakku tercinta,

Adik-adikku tercinta,

Sobat-sobat yang memberi dukungan dengan sepenuh hati.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Arief Budiman, M.A.g, selaku Ketua Jurusan al- Akhwal al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah tulus mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidikku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
8. Istri dan Anakku tercinta yang selalu memberi motivasi dan menghiburku disaat ku dalam kejenuhan.
9. Adik-adikku yang selalu memberi semangat kepadaku.
10. Teman-teman baikku (Nasukha, Fani /Piss, Fajar) yang selalau menghibur disaat ku dlm kejenuhan, selalu bilang piss, terimakasih atas semuanya.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya hingga penulisan skripsi ini selesai.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga penulisan skripsi tentang Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah dalam kitab “*Radd Al-Mukhtar*” karya Ibnu Abidin Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin-amin ya Robbal ‘Alamin.

Semarang, 20 Juni 2008

Penulis

Arif Rahman

ABSTRAK

Di dalam hukum Islam salah satu penghalang mendapat warisan adalah beda agama (orang kafir dengan orang Islam). Namun dalam persoalan menerima harta waris dari muwaris murtad, terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta waris dari muwaris murtad. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad, yang terdapat dalam kitab “*Radd Al-Mukhtar*” karya Ibnu Abidin.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengapa Abu Hanifah Berpendapat tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad dan Bagaimana metode *istimbath* hukumnya ? (2) Bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan pembagian warisan dalam masyarakat ?

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode pengumpulan data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang memuat tentang informasi dari permasalahan tersebut, dan menggunakan metode dokumentasi dalam memperoleh data. Setelah data terkumpul, maka penulis berusaha menjelaskan semua obyek permasalahan dengan sistematis serta memberikan analisis secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Imam Abu Hanifah orang Islam bisa menerima harta waris dari muwaris murtad, apabila orang murtadnya laki-laki maka harta bendanya yang didapat dikala Islamnya dapat diwarisi oleh ahliwarisnya yang Islam, apabila orang murtadnya perempuan semua harta benda dapat diwarisi ahli warisnya yang Islam. Abu Hanifah mengkiaskan tentang hal itu adalah bahwa kerabat orang yang murtad itu lebih utama dari pada kaum muslimin karena mereka mendapat warisan dengan dua sebab yaitu keislaman dan kekerabatan. Kemudian *istimbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya adalah ayat al-Qur'an dan Atsar (Fatwa Sahabat) yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 75, dan surat al-Ahzab ayat 6. Menurut ayat ini hubungan kerabat atau hubungan nasab itu lebih berhak mendapat warisan dari pada orang mu'min. Dan Fatwa Sahabat yang isinya bahwa Abu Bakar menyuruh membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim.

Namun penulis tidak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, karena salah satu syarat mendapat warisan adalah adanya hubungan agama atau seagama, di dalam Hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa: “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”, dari hadits itu jelas bahwa beda agama menjadi penghalang mewarisi. Kemudian menurut penulis harta orang murtad itu tidak bisa dipilah-pilah, baik harta laki-laki atau perempuan murtad itu sama saja tidak bisa dimiliki oleh ahli warrisnya yang Islam, karena di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang mukmin, yang terdapat dalam surat al-Nisaa' ayat 141. Maka ahli waris yang Islam tidak mendapat warisan. Harta tersebut ditahan semata-mata supaya dia kembali lagi kepada Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan skripsi	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS	
A. Pengertian Waris	17
B. Dasar Hukum Waris	19
C. Syarat Dan Rukun Waris	24
D. Faktor Penghalang Waris Mewarisi	27
E. Sebab-Sebab Menerima Warisan	36
F. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Mewarisi Harta Orang Murtad	41
BAB III PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD	
A. Biografi Abu Hanifah	44
B. Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad	52

	C. Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad	55
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD	
	A. Analisis Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad	62
	B. Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad Relevansinya Dengan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-Saran	76
	C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di Negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Tetapi pengaruh tersebut tidak dapat melampaui garis-garis pokok hukum kewarisan Islam. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli hukum Islam sendiri.¹

Membicarakan *faraidh* atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh mawarits* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.²

Hukum kewarisan Islam sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut (mutlak / tidak terbatas) dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1982, hlm. 1.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm. 147.

unsur yang berguna untuk senantiasa setiap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.³

Rasullullah SAW memerintahkan kita membagi harta pusaka menurut kitab Al-Qur'an, dalam sabda-Nya :

اخبرنا معمر بن عمار عن ابن عباس عن ابيه عن ابي عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسما المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. (رواه مسلم وابو داود)

Artinya : “Menghabarkan kepada kita Ma'marun dari Thowus, dari bapaknya, dari dari Abbas r.a., berkata, Rasullullah SAW, bersabda : Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)". (HR. Muslim).⁴

Al-Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber dalam hukum warisan, namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum secara langsung di dalam Al-Qur'an, sehingga menimbulkan perbedatan pendapat dikalangan ahli fiqih, diantaranya adalah mewarisi harta orang murtad.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan adalah sebagai berikut : hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*), hubungan perkawinan atau semenda, dan hubungan karena sebab memerdekakan budak atau

³ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, Cet. Ke-I, 1995, hlm. 1.

⁴ Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairiyian Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 1234.

hamba sahaya (*al-wala'*)⁵, hubungan agama⁶ (Berkenaan dengan hal ini mungkin terjadi orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris).⁷

Selain sebab-sebab menerima warisan juga terdapat beberapa hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan atau disebut *Mawani' al-Irts*. Seseorang yang berhak mendapat harta warisan, tetapi oleh karena ada sesuatu keadaan tertentu menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Yang menjadi penghalang menerima warisan ada empat yaitu : perbudakan (*al-abd*), pembunuhan (*al-qatl*), berlainan Agama (*ikhtilaf al-din*), dan berlainan negara.⁸ Tiga dari empat macam penghalang mempusakai, yakni perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama, telah disepakati oleh para fuqaha. Sedangkan berlainan negara sebagai penghalang mempusakai diperselisihkan.⁹

Salah satu penghalang menerima warisan adalah berlainan agama, maksudnya antara muwaris dengan ahli waris berbeda agama. Ini sudah disepakati oleh seluruh ulama, yang berdasarkan Al-Hadist Rasulullah riwayat Abu Dawud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه أبو داود)

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 42.

⁶ Sahrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, hlm. 53.

⁷ Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 12.

⁸ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta : Depag RI, 1986, hlm. 20.

⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987, hlm. 83.

murtad, sekalipun tadinya muwaris beragama Islam, berdasarkan pandangan orang murtad itu tidak beragama, berbeda dengan seorang muslim yang bukan muslim sejak semula. Seorang murtad tidak dapat menerima harta warisan dari muwaris yang kafir berdasarkan pandangan, orang murtad itu tidak beragama, sedang orang kafir itu beragama.¹³

Seorang murtad yang tadinya beragama Islam sekalipun kini tidak Islam lagi, berbeda dengan orang yang memang kafir sudah sejak semula. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika muwarisnya itu murtad dan ahli warisnya tidak, disini yang menjadi perdebatan dikalangan ulama dalam menentukan boleh tidaknya mewarisi harta orang murtad.

Tiadalah seseorang dapat menerima pusaka dari orang murtad, baik lelaki ataupun perempuan sebagaimana orang murtad tidak dapat menerima pusaka dari orang lain. Harta yang mereka perolehi sebelum murtad, ataupun sesudah murtad hingga sampai kepada masa mereka meninggal dalam keadaan kafir dijadikan harta *fai'* dan dimasukkan ke dalam Baitulmal.¹⁴ Dimasukkannya ke dalam Baitulmal, bukan karena dipandang menjadi harta pusaka kepada orang Islam. Dan tidak pula diberikan harta mereka kepada waris-waris mereka yang Islam, karena mereka meninggal dalam keadaan kafir. Kita telah mengetahui bahwa tidak ada pusaka antara muslim dengan kafir, demikianlah pendapat Ibnu

¹³ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁴ *Ibid.*

Abbas. Inilah yang dipandang oleh Imam Malik, Asy Syafi’I dan yang dipandang shahih dalam Madzhab Ahmad.¹⁵

Imam Malik dan Ahmad berargumen dari Al-Qur’an, yang mensinyalir bahwa setiap umat itu diberi tata-aturan sendiri-sendiri,¹⁶ seperti yang tercantum dalam surat al-Maidah : 48.



Artinya : “Bagi setiap umat diantara kamu kami ciptakan suatu peraturan dan tata cara”.....dst.nya. (QS. Al-Maidah: 48).¹⁷

Berbeda lagi dengan pendapat Imam Abu Hanifah ialah harta si murtad yang di peroleh di waktu dia masih Islam, menjadi pusaka bagi waris-warisnya yang Muslim, sedang hartanya yang diperoleh sesudah dia murtad menjadi fai’.¹⁸

Di samping itu terdapat pula pandangan yang menyatakan harta si murtad, baik yang diperoleh diwaktu dia masih Islam maupun yang diperoleh diwaktu dia telah murtad sampai pada saat dia meninggal, menjadi harta pusaka bagi waris-warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibn Mas’ud. dan inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan.¹⁹

Sementra itu Abu Hanifah sependapat dengan Abu Yusuf dan Muhammad dalam hal yang menyatakan harta seorang perempuan yang murtad, secara mutlak, baik yang diperoleh ketika masih Muslimah atau sesudah ia

¹⁵ Hasbi Ash Shiddleqy, *Fiqh Mawarist*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 47.

¹⁶ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 96.

¹⁷ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 92.

¹⁸ Ibnu Abidin , *Radd Al-Mukhtar Juz 10*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth, hlm. 507-508.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddleqy, *loc. Cit.*

murtad, menjadi harta warisan ahli warisnya yang Muslim. Orang perempuan yang murtad tidak dipandang musuh oleh Islam, karena 'Ishmahnya tetap terpelihara. Karena itulah atasnya tetap berlaku hukum atas muslim tentang hartanya, harta warisnya dan ahli-ahli warisnya.²⁰

Menurut ketentuan ilmu ushul fiqh, orang yang berbeda agama itu menjadi penghalang untuk menerima warisan, dalam artian orang kafir. Tetapi terdapat perbedaan mengenai mewarisi harta orang murtad, sebagian ulama ada yang tidak membolehkan orang Islam mewarisi orang murtad, dan sebagian membolehkan orang Islam mewarisi orang murtad.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad”.

B. Permasalahan

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah yang menjadi motivasi dalam penulisan skripsi ini, maka timbul beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan dan penyelesaian yaitu :

- a. Mengapa Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima harta waris dari muwaris murtad dan bagaimana metode istimbath hukumnya ?
- b. Bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan pembagian warisan dalam masyarakat ?

²⁰ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 32.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Untuk mengungkapkan mengapa Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima harta waris dari muwaris murtad dan bagaimana metode istimbath hukumnya ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya pendapat Abu Hanifah dengan pembagian warisan dalam masyarakat ?

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar, merupakan proses yang dilalui untuk mendapatkan teori. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya di bawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang ketentuan waris yaitu sebagai berikut:

Nita Wahyuni, lulus tahun 2004 S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul: *“Studi Analisis Pendapat Ibn Taimiyah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Non Muslim”*, Dalam skripsi ini menerangkan tentang orang Islam boleh atau berhak menerima warisan dari kerabat (ahli waris)-nya yang kafir dzimmi. Dengan alasan agar hubungan

kekerabatannya tidak terhalangi dari Islam di samping karena orang-orang Islam itu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kaum kafir zimmi sedangkan mereka tidak menolong umat Islam. Jadi dalam skripsi ini dikhususkan kepada kafir dzimmi saja yang bisa diwarisi hartanya oleh orang Islam.

Susilowati, lulus tahun 2006, S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul: "*Hak Waris Istri Yang Ditalak Ba'in Oleh Suami Yang Sedang Sakit Parah*" dalam skripsi ini menerangkan bahwa seorang suami yang dalam kondisi sakit parah menjatuhkan talak ba'in kemudian tidak berapa lama suami tersebut meninggal dunia, maka istrinya (mantan istrinya) bisa menerima warisan.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Dalam kitab ini diungkapkan bahwa tidak terdapat dalil yang jelas tentang kebolehan mewarisi harta orang murtad, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits, di dalamnya hanya membahas syarat dan rukun waris, sebab-sebab mendapat warisan, penghalang-penghalang warisan. Dalam pembahasan penghalang warisan yang dibahas hanya masalah orang kafir, dan masalah warisan orang murtad belum dibahas secara detail. Jadi dalam buku tersebut belum membahas mengenai warisan orang murtad.²¹

Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, dalam buku tersebut Ibnu Taimiyah berpendapat tentang kebolehan orang muslim

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4, Terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 484-487.

mewarisi harta orang kafir dzimmi, dalam buku tersebut memfokuskan non muslimnya kepada kafir dzimmi, Jadi dalam buku tersebut belum membahas mengenai warisan orang murtad.²²

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, menurutnya rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu: *al-Muwarris*, adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan. *al-Waris* atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. *al-Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.²³

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kompilasi hukum Islam Indonesia tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan Agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (ps. 171 huruf c). untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragam Islam, pasal 172 menyatakan:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi

²² Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta : INIS, 1991, hlm.126.

²³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 28-30.

yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.²⁴

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (ps. 171). Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya orang Kristen dan Budha tidak termasuk dalam pengertian ini.²⁵

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, dalam buku ini dipaparkan para ulama madzhab sepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi warisan yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Mengenai perbedaan agama para ulama madzhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi muslim? Imamiyah berpendapat seorang muslim bisa mewarisi non muslim sedangkan madzhab empat mengatakan tidak boleh.²⁶

Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, ia mengetengahkan bahwa dasar hukum kelainan agama sebagai *Mawani’ul Irsi* ialah Hadits Rasul yang berbunyi : “Orang Islam tidak dapat mewaris harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”. Juga ketika Abu Tholib meninggal

²⁴ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 166.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-IV, 2000, hlm. 404-405.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Masykur Ab, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta : Lentera Basritama, tth, hlm. 541-542.

dunia harta warisannya oleh Nabi Muhammad SAW hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan Tholib, Sedang Ali dan Ja'far yang telah muslim tidak diberi bagian. Dari Al-Hadits tersebut para ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi.²⁷

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kajian tentang waris masih bersifat umum. Di samping itu juga, dapat diketahui bahwa fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis mengkaji masalah kebolehan mewarisi harta dari muwaris murtad menurut pendapat Abu Hanifah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian.²⁸ Supaya dapat memperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan

²⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981, hlm. 15-16.

²⁸ Joko Subagya, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, hlm. 2. Menurut Hadari Nawawi, Metode Penelitian itu Metodologi Research adalah Ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²⁹

Karena penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan maka, penulis membaca buku-buku dan menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2.Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁰ Data-data yang digunakan terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat suatu informasi.³¹

Dalam hal ini penulis menggunakan kitab karya Ibnu Abidin “*Radd Al-Mukhtar*” sebagai sumber data primer. Kitab ini secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadikan rujukan utama dalam Madzhab Hanafi.

- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Cet.ke-20, 2004, hlm. 3.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 102.

³¹ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 135.

Mengenai data sekunder ini, peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk menjamin mutunya.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Dari penelaahan literatur tersebut akan diperoleh data-data yang melatarbelakangi tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad dengan masalah yang dibahas.

Dalam rangka pengumpulan data ini penulis mengadakan riset kepustakaan (*Library Research*), yakni penulis membaca buku-buku dan menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan historis yaitu untuk membuat rekrontuksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverivikasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegaskan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.³³

Dan tahap selanjutnya dianalisis secara kualitatif berupa penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik dan bukan angka yang lain.³⁴

³² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-9,1995, hlm. 85.

³³ *Ibid*, hlm. 16.

³⁴ Joko Subagyo, *op. cit.*, hlm. 106.

Dengan menggunakan nalar fikir induktif serta ditulis dengan menggunakan penulisan deskriptif analisis yaitu: menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara obyektif dan menginterpretasikan serta menganalisis data tersebut.³⁵

Penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat “Deskriptif Kualitatif” yang berusaha menggambarkan permasalahan yang ada di atas.³⁶

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan penulis adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan dan menilai data yang terkait dengan permasalahan di atas yang berkaitan dengan pendapat Abu Hanifah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya tulis ilmiah.

Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 37.

³⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2002, hlm. 68.

BAB II : Memuat gambaran umum tentang waris, gambaran umum tentang waris meliputi : Pengertian waris, Dasar hukum waris, Syarat dan Rukun waris, Faktor penghalang waris mewarisi, Sebab-sebab menerima warisan, Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Mewarisi Harta Orang Murtad.

BAB III : Mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad, Meliputi : Biografi Imam Abu Hanifah, Pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad, Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad.

BAB IV : Di dalam bab ini berisi dua sub yaitu: Analisis Istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad, Dan Analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad Relevansinya dengan sistem pembagian waris dalam masyarakat.

BAB V : Yaitu penutup yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup. Bab ini merupakan saripati seluruh bab dalam skripsi ini dan diharapkan mampu melahirkan teori dalam kesimpulan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkompeten. Itulah sebabnya di dalam skripsi ini dibuat saran-saran agar dijadikan telaah dan masukan bagi penulis (khususnya).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pokok dalam Islam, di dalamnya terdapat berbagai macam hukum, diantaranya adalah hukum waris. Bahkan kita telah sering mengenal kata warisan yang digunakan dalam hukum perdata maupun hukum adat.

Kata warisan yang sudah populer di dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa Arab *warisa*, *yarisu*, *warsan* : yang berarti mempusakai.¹ Kata **ورث** sebagai fiil, isimnya menjadi **ميراث** dijama'kan menjadi **الموارث**.²

Istilah yang sama artinya dengan waris ialah *fara'id* kata jama' bagi al-Fariidhoh, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian.³ Selanjutnya lafazh fardhu sebagai suku kata dari lafazh faridhah, menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain : **Taqdir** yakni suatu ketentuan seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 237, **Qath'u** yakni ketetapan yang pasti seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' : 7, **Inzal** yakni menurunkan seperti firman Allah dalam surat al-Qashash : 85, **Tabyin** yakni penjelasan seperti firman Allah dalam surat at-Tahrim : 2, **Ihlal** yakni menghalalkan seperti firman Allah dalam surat al-Ahzab : 38, **Atha'** yakni pemberian. Ke-enam arti tersebut dapat digunakan

¹Van Hoeven, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2002, hlm.191.

²Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981, hlm. 1.

³Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta : Depag RI, 1986, hlm. 1.

keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu faraidh itu mengandung saham-saham yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya yang fungsinya sebagai suatu pemberian yang bebas dan telah dijelaskan oleh Allah tentang halalnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.⁴

Sedang menurut istilah hukum syara' yaitu : pembagian harta pusaka kepada beberapa ahli waris seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas.⁵ Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (Ilmu Miraats) dan ilmu faraidl.⁶

Dalam kitab Ia-Natut Tholibin Ilmu faraidl diartikan sebagai berikut :

والفرض لغة التقدير و شرعاً هـنا نصيب مقدّر للوارث - اعانة الطالبين ثالث.

Artinya : "Faraidl menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan) dan menurut syara' (yang dimaksud disini) ialah bagian yang ditentukan bagi waris".⁷

Ilmu faraidl didefinisikan oleh Ulama dalam kitab Mughni al-Muhtaj karangan Asy-Syarbaini sebagai berikut :

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الوصول الى معرفة قدر الواجب من التركة لكل ذبحق

Artinya : "Ilmu fiqh yang bersangkutan paut dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak".⁸

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1981, hlm. 31-32.

⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 290.

⁶ Mudzakir AS, *Fiqh sunnah*, Jilid 14, Bandung : Al-Ma'arif, 1987, hlm. 235.

⁷ Abu Bakar Usman bin Muhammad Sattha al Dimmiyah al Bikri, *Ia-Natut Thoibin*, Juz III, Bairut : Dar Alkutub al Ilmiyah, t.th., hlm 384.

⁸ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 3.

Dengan singkat ilmu faraidl dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Definisi inipun berlaku juga bagi ilmu mawaarits, sebab ilmu mawaarits tidak lain adalah ilmu faraidl.

Adapun ilmu mawaris menurut para fuqaha ialah :

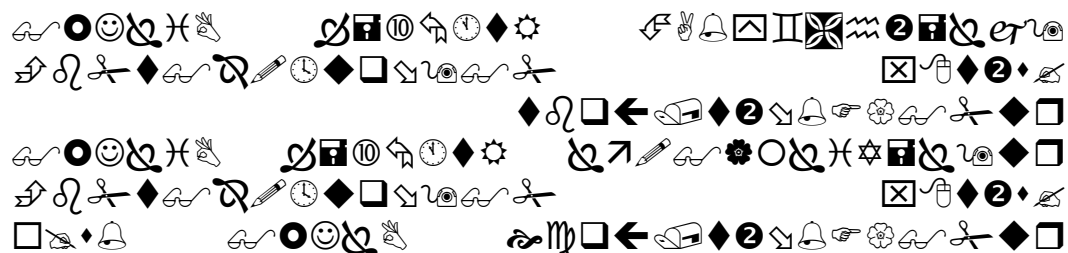
علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع .

Artinya : “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.”⁹

B. Dasar Hukum Waris

Sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an. Karena itu sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijthad) harus diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam surat an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Sebagai sumber hukum waris yang pertama adalah :

a. Al-Qur'an



⁹ Muslich Maruzi, *loc. cit.*



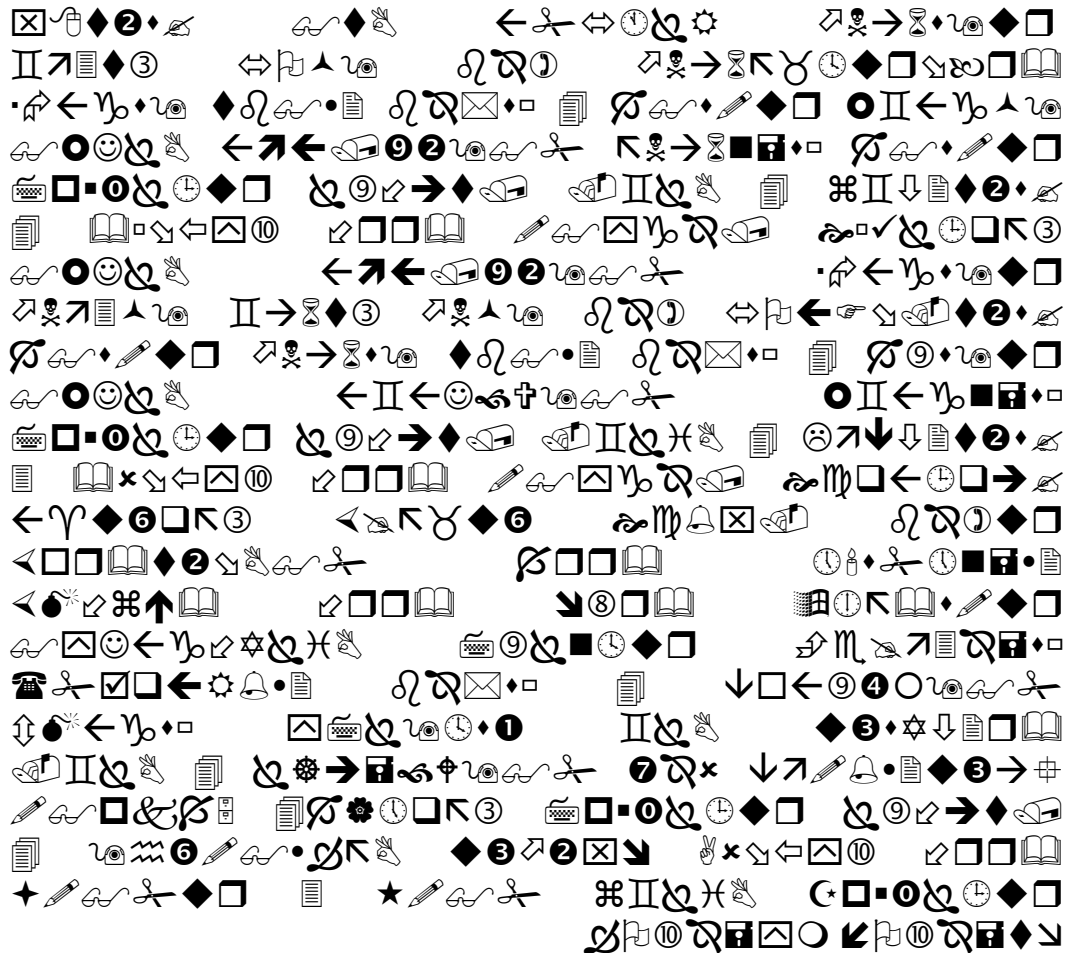
Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”. (Q.S. an-Nisa’ ayat 7)¹⁰



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

¹⁰ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 1981. hlm. 62.

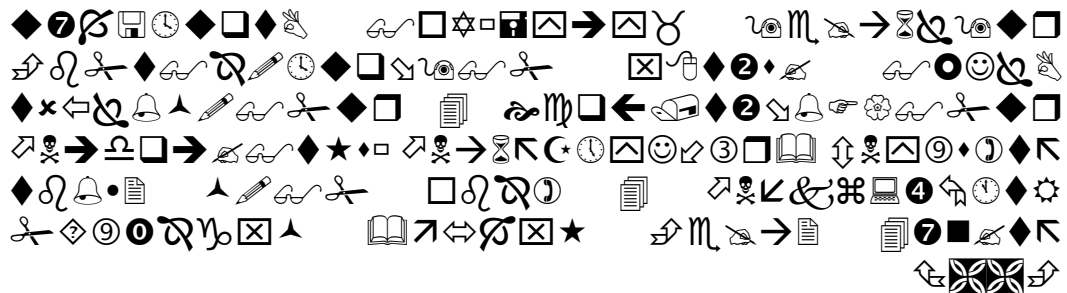
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisa’ ayat 11).¹¹



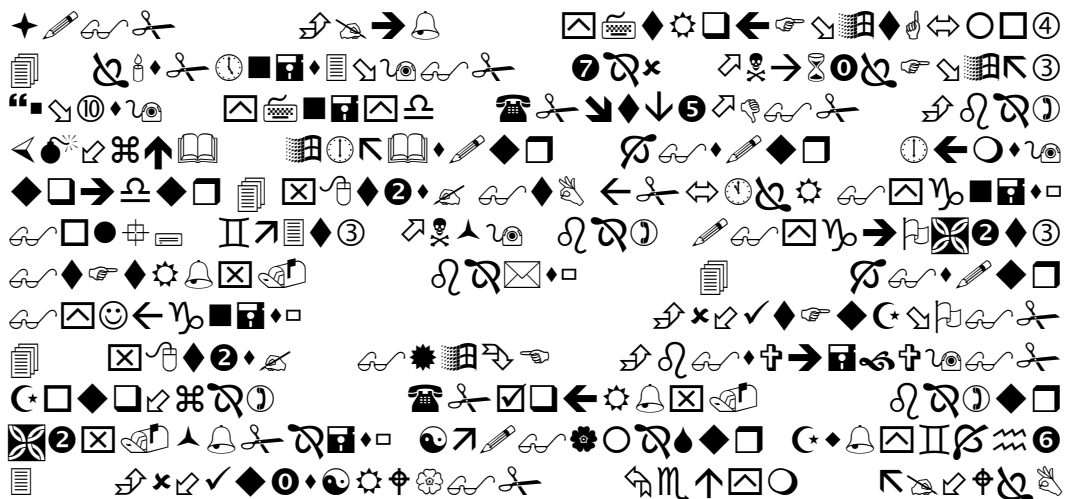
Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu

¹¹ Ibid.

buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. an-Nisa' ayat 12).¹²



Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa' ayat 33).¹³



¹² Ibid., hlm. 63.

¹³ Ibid., hlm. 66.



Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa’ ayat 176).¹⁴

b. Al-Hadits

Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur’an adalah Sunnah, sunnah memiliki fungsi sebagai penafsir atau pembei bentuk kongkrit terhadap Al-Qur’an, sebagai penganut hukum dalam Al-Qur’an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an.¹⁵ Diantara Al-Hadits tentang kewarisan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْحَقُّوْا الْفَرِئُضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه مسلم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kita Abdul A’la bin Hammad (yaitu al-Narsiyu). Telah menceritakan kepada kita Wuhaib dari Ibnu Thowas, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, berkata : Rasulullah SAW bersabda,

¹⁴ Ibid., hlm. 84.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002, hlm. 12.

berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR. Muslim).¹⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه أبو داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.” (HR. Abu Dawud).¹⁷

c. Al-Ijma

Di samping dasar-dasar hukum syara’ yang menjadi sumber hukum dalam menetapkan hukum suatu masalah, sering juga dipergunakan Ijma’ (kesepakatan para ulama).

Ijma’ menurut syara’ adalah suatu kesepakatan bagi orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (Mujtahid) di antara umat Nabi Muhammad SAW, sesudah Beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak

¹⁶ Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hijaj al-Qusyairiyian Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 1233.

¹⁷ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’atau, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 334.

ditentukan atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam Kitab dan Sunnah).¹⁸

d. Al-Ijtihad

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai Mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian waris yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam penerapan hukum (Tathbiq al-Ahkam) bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.¹⁹

C. Syarat Dan Rukun Waris

Pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-sekali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Oleh karena itu pusaka mempusakai memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Matinya Muwarrits (orang yang mewariskan).

Kematian muwarrits ada tiga macam yaitu :

- a. Mati hakiki atau sejati yaitu kematian (muwarrits) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim.

¹⁸ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 51.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

- b. Mati hukmy yaitu kematian (muwarris) atas dasar keputusan hakim.

Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud yaitu orang yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya.

- c. Mati taqdiry yaitu kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras.

Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.²⁰

2. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarrits dan

3. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mawani'ul irts).²¹

Rukun waris itu ada tiga, yaitu :

1. Muwarrits, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia, baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.²²
2. Pewaris (al Waarits), yaitu orang yang mempunyai hubungan kewarisan dengan mayat sehingga dia mendapat warisan.²³ Seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan simuwarrits.²⁴

²⁰ Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 12.

²¹ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 79.

²² Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 17.

²³ Mudzakir, *op. cit.*, hlm. 240.

²⁴ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 36.

3. Mauruts, yaitu harta peninggalan simati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya, dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.²⁵

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam mentakrifkan mauruts (tirkah) diantaranya :

- a. Sebagian fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa tirkah itu adalah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang, begitu juga Ibnu Hazm sependapat dengannya.
- b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mumutlakan tirkah kepada segala yang ditinggalkan oleh simati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak, baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan.
- c. Kitab Undang-Undang hukum warisan mesir mengambil pendapat jumhur dalam menetapkan pengertian tirkah yaitu segala apa yang ditinggalkan oleh simati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan-pelunasan hutang, baik hutang sisa yang diwasiatkan dan yang diterimakan kepada ahli waris.²⁶

D. Faktor Penghalang Waris Mewarisi

Mawani'il irsi atau penghalang hak mewarisi adalah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya. Mawani'il irsi ada empat macam, tiga diantaranya yang disepakati para fuqaha

²⁵ Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 11.

²⁶ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 37-39.

yaitu : pembunuhan, berlainan agama, perbudakan. Sedangkan yang diperselisihkan ada satu macam yaitu berlainan negara.

1. Pembunuhan (*al-qatl*)

Para ulama sepakat pendapatnya (selain hawarij) bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.²⁷

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sebagai berikut :

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو الشيخ الأصبغاني. ثنا محمد بن جعفر، ثنا العباس بن يزيد، ثنا عبد الرزق، أنا معمر، عن رجل، قال عبد الرزق، وهو عمرو بن برق عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال النبي صَلَّى الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَإِنْ رَسُلَ اللَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم قَضَى لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثُ. (رواه البيهقي)

Artinya : “Telah memberi kabar kepada kita Abu Bakar bin Haris al-Faqih, saya Abu Syekh al-Ashbahani, dari Muhammad bin Ja’far, dari Abas bin Yazid, dari Abdul Rozaq berkata : dia Amr bin dari Akromah dari Ibnu Abbas, berkata : Nabi SAW bersabda. Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta peninggalan.” (HR. Baihaqi).²⁸

²⁷ Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 13.

²⁸ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, Juz 6, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 220.

Namun demikian para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan macam-macam pembunuhan yang menghalangi sipembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya.²⁹

a. Menurut ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi ada dua macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan yang bersangsi *Qishash*, ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.³⁰

Dasar yang mewajibkan untuk menjatuhi hukuman / sangsi qishash kepada pembunuh adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 187.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”. (QS. al-Baqarah : 178).³¹

- 2) Pembunuhan yang bersangsi *Kafarat*, yaitu pembunuhan yang mirip sengaja³² atau pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau tidak

²⁹ Hasbi Ash Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris*, Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2001, hlm. 40.

³⁰ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 22.

³¹ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 21.

³² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 32.

mungkin ia dituntut puasa dua bulan berturut-turut.³³ Pembunuhan yang bersangsi kafarat ada tiga macam, yaitu:

- a) Pembunuhan mirip sengaja (syibhul ‘amdi) ialah sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
 - b) Pembunuhan karena Khilaf (qotlul-khoto’i) yaitu misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, tetapi setelah didekati ternyata manusia (khilaf maksud). Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai bapaknya yang berada didekatnya (khilaf tindakan).
 - c) Pembunuhan dianggap khilaf (al Jaar Majrol Khoto’i) yaitu misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhi saudaranya hingga mati.³⁴
- b. Menurut ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi penghalang mewarisi adalah : pembunuhan yang disengaja yang digerakkan oleh rasa permusuhan, baik pembunuhan secara langsung, atau secara tidak langsung (tassabbub). Sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja, tidak mencegah pusaka.³⁵

³³ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 87.

³⁴ Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 14.

³⁵ Hasbi Ash Shiddieqi, *op. cit.*, hlm. 42.

- c. Menurut fuqaha Syafi'iyah, menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi.³⁶
- d. Menurut Imam Ahmad bin Hambal mengemukakan pendapat bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman *Qishash*, *Kafarat*, dan *Diyat* yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris yaitu : pembunuhan disengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁷

2. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menyebabkan terhalangnya seseorang untuk memperoleh harta warisan. Misalnya, ahli waris beragama Islam muwarrisnya beragama Kristen atau sebaliknya.

Dasar hukumnya adalah Al-Hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَوِ بْنِ
عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه ابو داود)

³⁶ Abdul Ghofur Ansori, *op. cit.*, hlm. 33.

³⁷ *Ibid.*

Artinya : “Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriy dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.” (HR. Abu Dawud).³⁸

Dalam Al-Hadits riwayat Ahmad, al-Arba'ah, dan Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل الملتين شتى. (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

Artinya: “Dari Abdullah Ibn Umar r.a., ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (H.R. Ahmad, al-Arba'ah dan at-Turmuzi).³⁹

Hal ini diperkuat lagi di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 141 :



Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)”. (QS. an-Nisa': 141).⁴⁰

Perbedaan agama sudah disepakati oleh semua ulama, juga seluruh ulama sepakat seorang yang bukan muslim tidak akan menerima harta warisan dari seorang muslim, apabila yang menjadi sebab penerimaan itu perkawinan atau kekerabatan nasabiyah.⁴¹

Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman

³⁸ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'atau, *loc. cit.*

³⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, Terj. Mahrus Ali, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 404.

⁴⁰ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 146.

⁴¹ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 28.

Beliau, Abu Thalib, orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi Muhammad SAW harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu ‘Uqail dan Thalib, sementara anak-anak yang telah masuk Islam yaitu Ali dan Ja’far, oleh Beliau tidak diberi bagian.⁴²

Sementara orang murtad baik laki-laki maupun perempuan tidak menerima harta warisan dari al-muwarrits yang beragama Islam, Kafir dan Murtad⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris, untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam dalam pasal 172 menyatakan :

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.⁴⁴

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf *b*, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁴⁵

3. Perbudakan (*al-‘Abd*).

⁴² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 36.

⁴³ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 30.

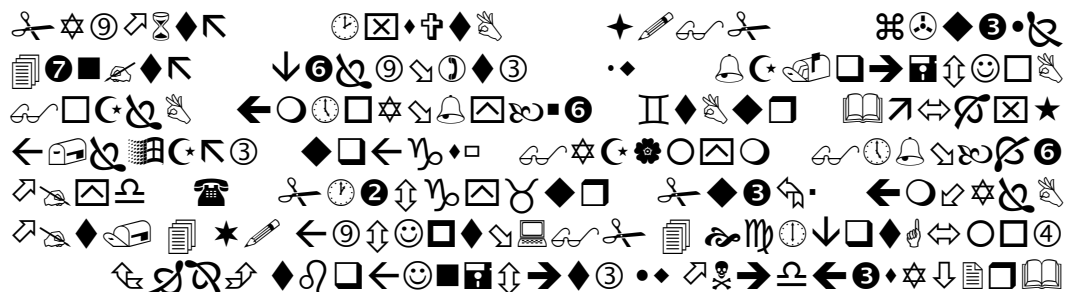
⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 404.

⁴⁵ *Ibid.*

Menurut kesepakatan para fuqaha budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat pula mewariskan. Sebab dia tidak dapat mewarisi dan mewariskan karena ia dianggap tidak mampu atau lemah.⁴⁶

Mengenai perbudakan yang menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Karena dianggap budak tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁷

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :



Artinya : “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (QS, 16: 75)⁴⁸

Seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, karena dianggap tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan

⁴⁶ Asymuni A. Rahman, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 20.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : PT. grafindo persada, 2002, hlm. 39.

⁴⁸ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 220.

kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya.⁴⁹

Untuk keadaan di Indonesia perbudakan ini sudah tidak relevan lagi karena memang tidak ada lagi tradisi semacam itu. Apalagi Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.⁵⁰

4. Berlainan Negara.

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan Negara asing.⁵¹

Dua negara dikatakan berlainan itu didasarkan pada karakteristik yaitu :

- a. Angkatan perangnya berlainan, artinya setiap negara mempunyai kesatuan angkatan perang sendiri.
- b. Kepala negara berlainan, artinya setiap negara mempunyai kepala negara sendiri, baik kepala negaranya bernama Sultan, Raja maupun Presiden.
- c. Tidak ada ikatan kekuasaan (*diplomatik*) satu sama lain.⁵²

⁴⁹ Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 16.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *loc cit.*

⁵¹ *Ibid.* hlm. 40.

⁵² Abdul Ghofur Ansori, *op. cit.*, hlm. 35.

Jika salah satu dari dua negara yang masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang sendiri mengadakan peperangan dengan negara yang lain, maka kedua negara tersebut merupakan dua negara yang berbeda, sebab ikatan kekuasaan dua negara tersebut sudah terputus oleh karena adanya permusuhan.

Sebaliknya, apabila kedua negara tersebut mempunyai ikatan kekuasaan dengan mengadakan perjanjian kerja sama dalam segala bidang terutama dalam bidang pertahanan untuk melawan musuh mereka bersama, maka kedua negara tersebut dianggap satu negara. Kendatipun wilayah kekuasaan, kebangsaan, bahasa dan agama warga negaranya berlainan.⁵³

Menurut para ulama apabila dua negara yang sama-sama sebagai negara muslim tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Karena pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara semata-mata hanyalah sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*Ukhuwah Islamiyah*).⁵⁴

E. Sebab-Sebab Menerima Waris

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu :

⁵³ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 106.

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 41.

1. Hubungan Kekkerabatan (*al-Qarabah*)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang berdasarkan faktor kelahiran, kekerabatan ini dinamakan nasab haqiqy.⁵⁵

Orang yang mengambil pusaka dengan jalan kekerabatan ini ada tiga :

- a. *Ashhabul furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu, yaitu

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{8}$. Kelompok ini ada sepuluh orang yaitu Bapak, Ibu,

Kakek, Nenek, Anak prp, Cucu prp, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, dan Saudara laki-laki seibu,⁵⁶ Ahmad Rofiq menambahkan Suami dan Isteri.⁵⁷

- b. *Ashabah Ushubah Nasabiyah* atau *al Ashabatun Nasabiyah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mengambil sisa tirkah dari bagian ashhabul wurudl.⁵⁸

Adapun macam-macam ahli waris ashobah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a) '*Ashabah bi Nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian 'ashabah. Kelompok ini adalah sebagai berikut : Anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, bapak, kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak

⁵⁵ Hasbi Ash Shiddieqi, *op. cit.*, hlm. 30.

⁵⁶ Husain Muhammad Mahluf, *Al-Mawaris fi Syari'at al-Islamiyah*, Mesir : al-Mathba'ah al-Madani, 1976, hlm. 34.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 68.

⁵⁸ Hasbi Ash Shiddieqi, *Loc cit.*

laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, mu'tiq dan mu'tiqoh (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).⁵⁹

- b) *'Ashabah bil Ghoir*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris yang menerima bagian *'Ashabah bil Ghoir* adalah : Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.⁶⁰
- c) *'Ashabah Ma'a al-Ghoir*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. Ahli waris yang menerima bagian *'Ashabah Ma'a al-Ghoir* adalah : Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau

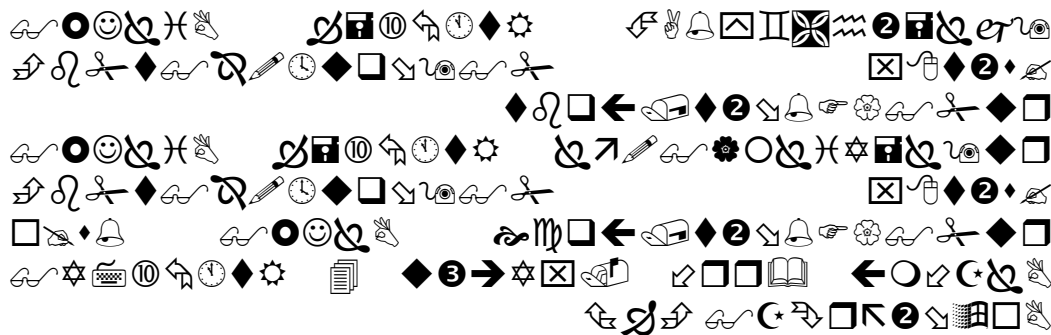
⁵⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 69.

⁶⁰ Husain Muhammad Mahluf, *op. cit.*, hlm. 102-103.

lebih), saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).⁶¹

- c. *Dzawil Arham*, yaitu ahli waris yang tidak termasuk kedalam golongan Ashhabul Furudl, dan Ashabah.⁶² Ahli waris *Dzawil Arham* adalah sebagai berikut : Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan paman, paman seibu, anak dan saudara-saudara laki-laki seibu, saudara perempuan bapak, saudara-saudara seibu, kakek dari garis ibu, nenek dari pihak kakek.⁶³

Hubungan kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 7.



Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Hasbi Ash Shiddieqi, *loc cit.*

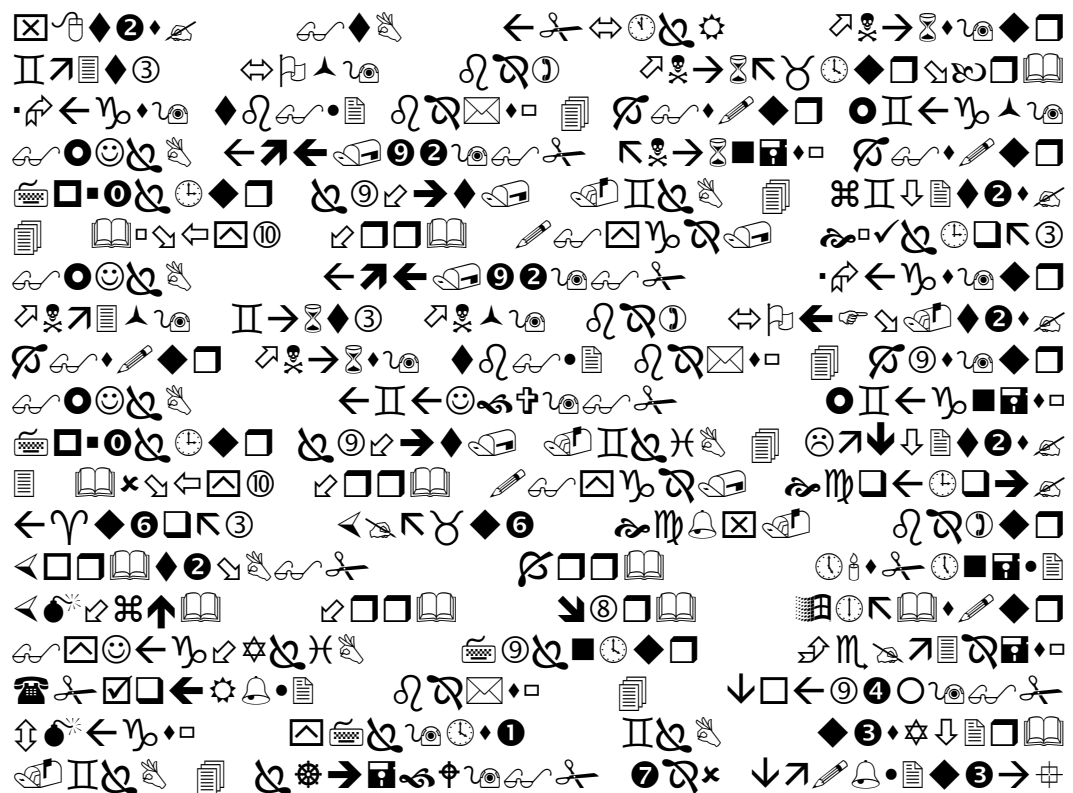
⁶³ Syekh Abdullah bin Syekh Hasan al-Hasan al-Kauhaji, *Zadd al-Mukhtaj*, Juz 3, Beirut : Al-Maktabah al-Ashriyah, t.th., hlm. 14-15.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(QS. an-Nisa’: 7).⁶⁴

2. Hubungan Perkawinan (*al-Mushaharah*)

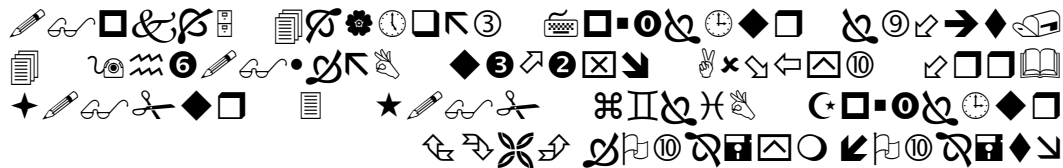
Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka merealisasikan kebahagiaan hidup keluarga tentram dan kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁶⁵

Hubungan pernikahan dijadikan sebagai penyebab mendapat warisan sesuai dengan firman Allah dalam surat an-nisa’ ayat 12 yang berbunyi :



⁶⁴ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 110.

⁶⁵ Abdul Ghofur Ansori, *op. cit.*, hlm. 29.



Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sebuah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutang mu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah di bayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. .”(QS. an-Nisa’: 12).⁶⁶

Bahwa ayat di atas menerangkan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami istri.

3. *Al-Wala’* (memerdekakan hamba sahaya atau budak).

Al-Wala’ di sebut dengan *Wala’ul-‘Ataqah* atau ‘Ashubah Sababiyah yakni usubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.⁶⁷

Kekerabatan menurut hukum itu terjadi lantaran :

- Seseorang membebaskan budak

⁶⁶ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 63.

⁶⁷ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 121.

- Adanya perjanjian tolong menolong saling setia antara seseorang dengan yang lain.⁶⁸

Jadi apabila seseorang telah membebaskan budak, maka berarti dia telah merubah status orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak dan cakap mengurus harta benda milik sendiri, maka sebagai imbalannya bila budak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta kekayaan tersebut dapat diwarisi oleh orang yang pernah memerdekakannya.

F. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Mewarisi Harta Orang Murtad

Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan ini sudah disepakati oleh para ulama bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling waris mewarisi. Berdasarkan Al-Hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.” (HR. Abu Dawud).⁶⁹

Dalam Al-Hadits riwayat Ahmad, al-Arba’ah, dan Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut :

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’atau, *loc. cit.*, Juz 2.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل الملتين شتى. (رواه أحمد وأبو ربيعة وأبو داود)

Artinya: “Dari Abdullah Ibn Umar r.a., ia berkata Rosulullah bersabda: Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (H.R. Ahmad, al-Arba’ah dan at-Turmuzy).⁷⁰

Juga ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yakni Uqail dan Tholib, sedangkan Ali dan Ja’far yang telah muslim tidak di beri bagian.⁷¹

Seorang murtad yang tadinya beragama Islam sekalipun kini tidak Islam lagi berbeda ketentuannya dengan orang yang memang kafir sejak semula.⁷² Yang menjadi persoalan bagaimana hukum mewarisi harta orang murtad.

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i dan yang dipandang shoheh dari pendapat Ahmad adalah bahwa ahli waris ini tidak dapat menerima harta warisan dari muwaris murtad. Dan harta yang di dapat oleh si murtad sebelum mereka murtad, sesudah murtad, dan sampai dia meninggal, ditetapkan sebagai harta fa’i dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Bukanlah oleh karena harta itu di pandang sebagai harta warisan kepada orang Islam. Juga harta itu tidak akan diberikan kepada ahli-ahli waris yang Islam, sebab mereka meninggal dalam keadaan kafir.⁷³

Menurut ulama aliran Az-Zaidiyah, Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa harta benda setiap orang murtad yang didapat sebelum mati atau diputuskan

⁷⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *loc. cit.*

⁷¹ Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 15.

⁷² Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *op. cit.*, hlm.30.

⁷³ *Ibid.*

menggabungkan diri kepada musuh, walaupun hasil yang didapat setelah riddah, adalah hak ahli waris yang beragama Islam. Sebab kematian orang murtad itu di hitung mulai waktu mati haqiqy atau diputuskan menggabung diri kepada musuh, bukan didasarkan sejak mulai riddah.⁷⁴

Di dalam hukum adat yang berlaku hampir di seluruh daerah lingkungan hukum adat di Indonesia tidak mengenal perbedaan agama itu sebagai penghalang mempersakai, kendatipun semula agama mereka sama, kemudian salah seorang dari muwaritsnya murtad.⁷⁵

⁷⁴ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 104.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 105.

BAB III

PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD

A. Biografi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah nama lengkapnya Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zuta al-Taimini. Abu Hanifah berasal dari keturunan Persia dan lahir di Kufah pada tahun 80 H / 700 M.¹ Beliau seorang sarjana Ajam (bukan arab) yang lebih dikenal dengan kumyahnya “Imam Abu Hanifah”, beliau wafat pada tahun 150 H di Kufah Iraq.²

Imam Abu Hanifah terkenal dengan gelarnya sebagai *Al-Imamul-A'zham* yaitu disebabkan karena kemahirannya dan keluasan ilmunya.³ Abu Hanifah termashur dengan gelar Imam Hanafi, ada tiga sebab beliau mendapat gelar Imam Hanafi yaitu :

- a. Pertama, karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah.
- b. Kedua, karena ia seorang yang sejak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati Agama, maka ia dianggap seorang yang “Hanif” (cenderung) kepada Agama, itulah sebabnya beliau termasyhur dengan nama Abu Hanifah.

¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Departemen Agama, t th. hlm. 447.

² Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1993, hlm.136.

³ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1976, hlm. 53.

- c. Ketiga, menurut bahasa Persi, Hanifah berarti tinta, Imam Hanafi ini sangat rajin menulis Hadits-hadits, karena ia pergi selalu bawa tinta, sehingga beliau dinamakan Abu Hanifah yang berarti bapak tinta.⁴

Walaupun terdapat beberapa riwayat yang menerangkan sebab beliau di panggil dengan sebutan “Abu Hanifah” namun dari semua riwayat itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa panggilan “Abu Hanifah” itu ada hubungannya dengan cita- cita, sifat- sifat, perbuatan dan tindak-tanduk beliau yang sangat terpuji dan dinilai oleh orang yang mengetahuinya.

Imam Abu Hanifah menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di kufah. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal Al- Qur'an. Beliau dengan tekun dan senantiasa mengulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya sekaligus menjadikan lebih mendalami makna yang dikandung ayat tersebut.⁵

Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah termasuk seorang yang shaleh dari masa tabi'in, beliau merupakan salah seorang Tabi'in, karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Pekerjaan beliau setiap harinya tidak ada yang kosong, seluruhnya berisi ibadah dan amal belaka. Zuhud, Warak dan sangat berhait-hati dalam urusan hukum, jiwanya kuat, akhlaknya mulia, setiap malam tidak tidur melainkan

⁴ Tamar Djaja, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab*, Solo : CV Ramadhani, 1984, hlm. 12.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al- Fiqh 'alaal- Madzahib al- Khamsah*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al- kaff, Jakarta : Lentera, Cet. ke-II, 2004, hal. xxv.

mempergunakannya untuk beribadat. Setiap malam pula ia mengkhatamkan Al-Qur'an seperti diwaktu siangnya, jadi sehari semalam dia mengkhatamkan Al-Qur'an dua kali.⁶

Imam Abu Hanifah pertama kali sebagai pedagang seperti nenek moyangnya, namun tak lama kemudian beliau mulai berniat mendalami pendidikan. Beliau mengikuti kuliah fiqh yang disampaikan oleh Hammad, kemudian mulai belajar Hadits. Abdul Mahsin al-Syafi'i membuat daftar guru-guru hadits Imam Abu Hanifah sembilan puluh tiga orang diantaranya adalah Tabi'in Kufah. Beliau di Basrah belajar dari Qatada dan Syu'bah sebagai "Amir Al-Mukaminin Fil Hadits" pemimpin orang-orang beriman dibidang Hadits. Syu'bah terkesan dengan usaha yang dilakukan Imam Abu Hanifah sehingga mengizinkan mengajar Hadits dan meriwayatkannya.⁷

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah beliau pergi ke Makkah dan Madinah pusat dari sumber pengajaran agama, lalu bergabung sebagai murid dari ulama terkenal Atha bin Abi Rabah Abdullah bin Umar. Kemudian Imam Abu Hanifah menjadi muridnya sampai Atha meninggal pada tahun 115 H. Imam Abu Hanifah selalau mengunjungi makam Gurunya bila berkunjung ke Makkah dan duduk dengan khidmatnya dalam majelisnya. Sewaktu di Makkah beliau juga mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Ikrimah, seorang murid Abdullah bin Abbas yang terkenal. Beliau juga sangat

⁶ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 21.

⁷ Abdur Rahman, *op. cit.*, hlm. 137.

beruntung dapat mempelajari Hadits dan beberapa masalah fiqh dari Ali bin Abi Tholib, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aqrabah bin Umar, Shafwan, Jabir, dan Abu Qatadah, selain gurunya sendiri Abdullah bin Abbas.⁸

Ada beberapa faktor yang membantu dan memudahkan beliau senantiasa berusaha dan memperdalam agama Islam, sehingga sampai sekarang diakui sebagai pendiri madzhab yang pertama rasional dalam pemikirannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dorongan dari keluarga, beliau tidak ada yang mengganggu pikirannya, bahkan kebutuhannya sehari-hari selama menuntut ilmu selalu dicukupi.
2. Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya.
3. Simpatik dan kekaguman beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab, dan Abdullah bin Mas'ud.
4. Kota Kuffah, Bashrah, Baghdad, sebagai kota yang berdekatan yang pada waktu itu merupakan pusat Ilmu Pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran agama Islam. Ketika itu Irak banyak dibicarakan dan dikembangkan filsafat Yunani Kuno, Filsafat Romawi dan Aliran Helenisme.⁹

Semasa hidupnya Imam Abu hanifah pernah ditunjuk oleh Gubernur Yazid menjadi kepala urusan perbendaharaan Negara (Baitul Mal). Tetapi beliau menolaknya, padahal beliau sangat dipercaya untuk jabatan itu. Dilain waktu

⁸ *Ibid.* hlm. 138-139.

⁹ Depag RI, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981, hlm. 77.

Gubernur Yazid menawarkan pangkat qadhi, tetapi beliau tetap menolaknya, sehingga Gubernur tidak senang melihat sikap seperti itu. Dilain hari lagi beliau mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Bagdad supaya beliau datang menghadap ke Istana, setelah sampai di depan Istana Bagdad beliau ditetapkan oleh baginda menjadi hakim atau qadhi kerajaan di Bagdad.

Imam Abu Hanifah selalu menolak tawaran yang diberikan sehingga beliau ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara Bagdad. Beliau setiap paginya didera atau dicambuk dengan cemeti sedangkan lehernya dikalungi dengan rantai besi yang berat. Sungguhpun hukuman itu telah dijalannya, seujung rambutpun Imam Abu Hanifah tidak merubah pendiriannya sampai Beliau meninggal dalam penjara. Menurut riwayat beliau meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Beliau wafat pada bulan rajab 150 H (767M).¹⁰

Sedangkan hasil karya Imam Abu Hanifah meskipun beliau ahli Islam namun sampai sekarang tidak banyak yang kita nikmati, hal ini dapat dimaklumi sebab dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan namun belum sempat dituangkan dalam karya yang sistematis, beliau terburu masuk penjara yang relatif lama, sehingga dari apa yang kita baca dari hasil karya beliau sebenarnya hanya sekedar kuliah dari beberapa muridnya untuk kemudian dikodifikasikannya. Adapun kitab yang sudah dibukukannya adalah :

1. Kitab Al-Mabsuth
2. Kitab Al-Jami'ush Shaghir

¹⁰ Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 25-33.

3. Kitab Al-Jami'ul Kabir
4. Kitab Ash-Sharihus Shagir
5. Kitab As-Sharihul Kabir
6. Kitab Az-Ziadat
7. Kitab Al-Faraidl
8. Kitab Asy-Syurut
9. Kitab Fiqhul Akbar.¹¹

Murid-murid Imam Abu Hanifah banyak, namun yang terkemuka sebagai ulama besar yang dikenal namanya di dunia Islam ada empat yaitu :

1. Imam Abu Yusuf, Yacoup bin Ibrahim Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H, ternyata karena kepandaianya ia dijadikan kepala murid Imam Hanafi, ia banyak membantu Imam Hanafi dalam menyiarkan madzhabnya, ia disebut ulama yang paling banyak mengumpulkan hadist, karena itu Imam Abu Yusuf termasuk ulama ahli Hadits terkemuka.
2. Imam Hasan bin Ziyadal-lu'luy, ia dikenal sebagai seorang ahli fiqih yang merencanakan menyusun kitab Imam Hanafi dalam ilmu ini, ia dikenal pula sebagai ahli Qiyas.
3. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat Asy Syaibani, sejak kecil tinggal di Kufah kemudian pindah ke Bagdad, ia cenderung kepada ilmu Hadits.

¹¹ Munawar Kholil, *Biogarafi Empat Serangkai Fiqh Imam Madzhab*, Jakarta : CV Bulan Bintang, 1965, hlm.66-68.

4. Imam Zafar bin Huzailbin Qais al Kufi, ia juga ahli Hadits. Inilah empat murid yang terkemuka yang mempunyai keahlian tersendiri dalam Ilmu Fiqih, Ilmu Hadits, Ilmu Ra'yu, dan lainnya.¹²

Mengenai Metodologi Imam Abu Hanifah dalam berijtihad tidak terlepas dari latar belakang kehidupan beliau sebagai seorang saudagar dan lingkungan masyarakat yang mengikutinya Beliau hidup dalam masyarakat yang telah maju peradaban dan sosial budayanya yaitu kota Baghdad. Baghdad adalah ibu kota Irak yang merupakan pusat kebudayaan dan informasi Ilmu Pengetahuan. Dan di kota itulah bertemu dan berkumpul antara filsafat persia dan yunani, juga merupakan pusat berkembangnya berbagai aliran politik dan ilmu kalam dan ilmu fiqh seperti aliran Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Banyaknya aliran politik ilmu kalam yang saling bersaing menyebabkan banyak timbulnya pemalsuan Hadits yang bermotifkan untuk kepentingan golongan atau politik mereka agar mendapat simpati dan dukungan. karena kondisi yang demikian sangat mempengaruhi dalam menerima dan menetapkan keshahihan Hadits. Beliau hanya menerima Hadits yang telah mencapai pada tingkatan masyhur, Hadits yang diriwayatkan perorangan tidak diterima.

Dikarenakan sempitnya wilayah penggunaan Hadits oleh Imam Abu Hanifah, sebagai akibat ketatnya dalam menerima hadits karena pada saat itu di kota Kufah, Baghdad berkembang Hadits-hadits palsu maka beliau banyak memakai *ra'yu* dan rasionalisasi nash, dalam hal ini beliau banyak memakai *al-*

¹² Tamar Djaja, *op. cit.*, hlm. 19-20.

Qiyas dan *Istihsan* sebagai dasar *Ijtihadnya*. Penggunaan rasio tersebut dikarenakan disamping alasan tersebut diatas, juga karena dalam masyarakat Irak yang sangat dinamis dan heterogen tersebut banyak timbul peristiwa hukum yang baru yang tidak dapat ditemukan di dalam nash secara literer, maka memerlukan jawaban dengan menggunakan penalaran nash, kecuali daerah Irak sangat jauh dari sumber hadits yaitu Mekkah dan Madinah, oleh karena itu beliau banyak memakai dasar *ra'yu* (rasio) dalam *ijtihadnya* bahkan beliau lebih mendahulukan *ra'yu* dari pada hadits ahad.

Imam Abu Hanifah dalam berijtihad memakai dasar *ra'yu* (rasio), maka beliau sering disebut sebagai Imam ahli *ra'yu* atau Imam kaum rasionalis. Adapun dasar utama Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah :

1. Al – Qur'an
2. Al- Hadits.
3. Fatwa Sahabat.
4. Ijma'
5. Qiyas.
6. Istihsan .
7. Adat dan Urf masyarakat.¹³

Imam Malik menyebutkan, bahwa Abu Hanifah itu adalah seorang ahli logika dan pembuktiaanya terhadap sesuatu masalah penuh dengan argumen yang bersifat rasional. Prinsip fiqh Hanafi diletakkan atas dasar :

¹³ IAIN Syarif Hidayatullah, *op. cit.*, hlm. 448.

- a. Memberikan kemudahan dalam ibadah dan muamalat.
- b. Menjaga pihak orang yang fakir dan daif.
- c. Memberikan kebebasan untuk berbuat sekedar kemampuan.
- d. Menjaga kemerdekaan manusia dan kemanusiaannya.¹⁴

B. Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad

Para fuqaha sepakat bahwa berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan muwaris berbeda agama.¹⁵ Berdasarkan al-Hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriyi dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.” (HR. Abu Dawud).¹⁶

Seorang murtad, yang tadinya beragama Islam sekalipun kini tidak Islam lagi, berbeda ketentuannya dengan orang yang memang kafir sejak semula, Karena itulah yang dimaksud dengan kafir pada ketentuan di atas ialah orang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta : Depag RI, 1986, hlm. 28.

¹⁶ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'atau, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 334.

kafir yang memang sudah sejak semula sudah kafir, bukan yang pada mulanya Islam kemudian menjadi kafir.¹⁷

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai mewarisi harta orang murtad, banyak ulama yang tidak sepakat diantaranya Imam Syafi’I, Imam Maliki, dan Imam Hambali mereka berpendapat semua harta orang murtad itu menjadi harta fai’ dan ditaruh di kas perbendaharaan negara Islam (Baitul Mal).¹⁸ Namun hanya Abu Hanifah yang membolehkan harta orang murtad untuk diwarisi ahli warisnya yang muslim. Adapun pendapat Abu Hanifah dalam kitab Radd Al-Mukhtar adalah :

وذهب الامام ابو حنيفة الى ان الذي يورث هو كسب اسلا مه دون كسب رده فانه يكون فيئا.

Artinya: “Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang murtad itu bisa diwarisi hartanya yang dihasilkan ketika masih Islam dan harta yang dihasilkan setelah murtad itu merupakan harta fai’”.¹⁹

Dalam kitab Hawi Al-Kabir juz 8, juga diterangkan :

وهو مذهب ابي حنيفة ان ما كسبه قبل رده يكون لورثته المسلمين وما كسبه بعد رده يكون فيئا لبيت المال الا ان يكون المرتد امرأة فيكون جميعه موروثا.

Artinya: “Dan Abu Hanifah berpendapat, sesungguhnya harta yang didapat atau dihasilkan sebelum ia murtad itu merupakan harta pusaka oleh ahli warisnya yang Islam dan harta yang didapat atau dihasilkan setelah ia murtad itu merupakan harta fai’ dan dimasukkan kedalam Baitul Mal, kecuali sesungguhnya harta benda orang perempuan murtad semuanya

¹⁷ Asyamsuri A. Rahman, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-ma’arif, 1981, hlm. 105.

¹⁹ Ibnu Abidin , *Radd Al-Mukhtar*, Juz 10, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. hlm. 508.

baik yang didapat sebelum murtad atau sesudah murtad itu dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam”.²⁰

Dalam kitab Fiqhul Islam Waadillatuhu Juz 8, juga diterangkan :

لابي حنيفه فان المسلم يرث عنده من المرتد.

Artinya: “Abu hanifah berpendapat sesungguhnya orang muslim bisa mewarisi hartanya dari orang murtad”.²¹

Pendapat Abu Hanifah juga terdapat dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang isinya:

قل ابو حنيفة والثوري و جمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين

Artinya: “Menurut pendapat Abu Hanifah, Ats Tsauri, Jumhur ulama Kufah, dan sebagian besar ulama Bashrah, kerabatnya dapat mewarisi hartanya selama para ahli warisnya itu adalah orang muslim”.²²

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seorang murtad mati atau dibunuh karena ke-riddahannya atau diputuskan oleh hakim bahwa ia telah menggabungkan diri kepada musuh, maka harta peninggalannya diperinci sebagai berikut:

1. Harta benda orang laki-laki murtad
 - a. Harta benda yang didapat dikala Islamnya, sebelum ia murtad dan sesudah diambil untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang dipusakai oleh ahli warisnya yang Islam. Sebab kematinnya disandarkan kepada waktu riddahnya itu dia sudah dapat dikenai pidana mati dan sekaligus ia disuruh

²⁰ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Hawi Al-Kabir*, juz 8, Beirut : Dar Al-Kutub, hlm. 145.

²¹ Wahhab Al zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Juz 8, Beirut : Dar Al-Fakru, tth, hlm 256.

²² Al-Imam Al-Qadhi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Al-Qurthubi Al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Samaro', 595 H, hlm. 264.

untuk memilih antara taubat atau dibunuh. Dengan demikian ia sudah dapat dihukumi mati disaat mulai riddah. Disaat itu harta peninggalannya sudah dapat dipusakai oleh ahli waris yang mempunyai predikat “waris” diwaktu riddahnya.

- b. Adapun harta benda yang didapat setelah riddahnya disetorkan kepada kas perbendaharaan Negara Islam, lantaran harta benda tersebut tidak ada yang memilikinya dan dianggap tidak ada ahli waris yang berhak mewarisi setelah riddahnya.²³

2. Harta benda orang perempuan murtad

Bila orang murtad tersebut perempuan, maka kematiannya tidak disandarkan pada saat riddahnya, sebab ia tidak dikenakan pidana mati lantaran riddahnya, tetapi hanya dikenakan penjara saja. Oleh karena itu kematiannya dihitung ia sejak mati haqiqy, atau sejak diputuskan menggabungkan diri kepada musuh. Harta benda orang perempuan murtad yang didapat sebelum mati haqiqy atau sebelum diputuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun harta benda itu diperoleh sesudah riddah diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.²⁴

²³ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 103-104.

²⁴ *Ibid.*

C. Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan bahwa istimbath Imam Abu Hanifah adalah menggunakan tujuh macam dasar yaitu : al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan (Maslahat mursalah) dan Urf.

- a. Al-Qur'an yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan secara mutawatir, artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. al-Qur'an merupakan dasar hukum yang paling utama.
- b. Sunnah yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan taqririnya (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya).
- c. Ijma' yaitu suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (mujtahid) diantara umat Nabi Muhammad SAW, setelah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan dalam Kitab dan Sunnah.
- d. Fatwa Sahabat yaitu pendapat-pendapat sahabat yang dijadikan sebagai dasar hukum Islam.
- e. Qiyas yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang

telah ada atau telah ditetapkan oleh Kitab dan Sunnah, disebabkan sama '*illat* antara keduanya (asal dan furu').²⁵

- f. Istihsan yaitu pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas *jali* kepada qiyas *khafi*, atau dari dalil *kully* kepada hukum *takhshish* lantaran terhadap dalil yang menyebabkan mujtahid menyalahkan berfikirnya, dan mementingkan perpindahan.
- g. Urf yaitu segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.²⁶

Tetapi dalam kaitannya dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad, dengan memperhatikan pendapat seperti di atas, ternyata tidak semua metode-metode tersebut dipakainya melainkan hanya beberapa metode saja, diantaranya Imam Abu Hanifah menggunakan nash al-Qur'an, dan Atsar (Fatwa Sahabat).

Adapun istimbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya membolehkan orang Islam menerima harta waris dari muwaris murtad, diambil dari ayat al-Qur'an terdapat pada surat al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :

²⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 32.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : DDII Jakarta-Indonesia, 1972, hlm. 118.



Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”.(QS al-Ahzab ayat 6).²⁷

Namun dalam ayat di atas Abu Hanifah lebih memfokuskan pada kalimat:



Artinya : “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) dalam kitab Allah”.

Maksud dari kalimat di atas orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk mewarisi karena adanya hubungan persaudaraan nasab, dari pada orang mu'min yakni saudara seagama. Inilah ketentuan yang telah ditetapkan dan difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya.

²⁷ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 1981. hlm. 334.

Sesungguhnya ayat ini mengembalikan berbagai macam perkara kepada alur yang sebenarnya, dan ia membatalkan suatu hukum yang disyari'atkan dalam keadaan darurat yang bersifat isidentil, yaitu menerima warisan karena saudara seagama, persaudaraan karena hijrah diantara orang Muhajirin dan Ansar yang hal ini mengakibatkan saling mewarisi diantara kedua golongan, seorang Muhajirin dapat mewarisi seorang Ansar, sedangkan keluarga orang Ansar dan family-familynya tidak dapat mewarisinya.²⁸

Imam Abu Hanifah menggunakan ayat ini sebagai istimbath hukum tentang kebolehan menerima harta waris dari muwarris murtad, karena hubungan kerabat atau hubungan nasab itu lebih berhak mendapat warisan dari pada orang mu'min, sehingga Imam Abu Hanifah membolehkan orang Islam menerima harta waris dari muwarrits murtad, karena orang Islam tersebut mempunyai hubungan darah dengan orang murtad meskipun beda agama.

Kemudian dalam surat al-Anfal ayat 75, juga diterangkan bahwa hubungan kerabat lebih berhak saling mewarisi.



Artinya : “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain di dalam Kitab Allah”.

Maksud dari ayat di atas bahwa Ulu ‘l-Arham : kaum-kerabat dan orang-orang yang mempunyai hubungan silaturahmi : bentuk jama’ dari rahmun,

²⁸ Anwar Rosyidi, *et al.*, *Terjamah Tafsir Al-Maragi*, Juz XXI. Semarang : CV Thoha Putra, 1989, hlm. 247.

asalnya adalah rahim wanita, yakni tempat pembentukan janin. Kaum kerabat dinamakan demikian karena mereka berasal dari satu rahim.

Yakni : kaum kerabat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak daripada kaum Muhajirin dan Anshar untuk saling menolong dan saling mewarisi dinegeri hijrah pada masa itu dan setiap masa. *Fi kitabihi*, berarti di dalam hukum yang telah ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya yang Mu'min, dan dengan itu Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengadakan hubungan silaturrahim serta memberikan wasiat kepada dua orangtua dan kaum kerabat.²⁹

Imam Abu Hanifah berpendapat orang murtad itu bisa diwarisi hartanya oleh ahli warisnya yang Islam karena ayat tersebut menyebutkan bahwa yang lebih berhak mewarisi karena adanya hubungan kerabat dari pada orang-orang mu'min. Dalam artian meskipun beda agama (antara muwarrits dengan ahli waris) itu lebih berhak mewarisi dari pada ahli waris yang lain. Sehingga Imam Abu Hanifah menggunakan ayat tersebut sebagai *istimbath* hukum dalam menentukan kebolehan orang Islam mewarisi harta orang murtad.

Dan *Atsar* (Fatwa Sahabat) yang digunakan sebagai *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwarris murtad :

روى زيد بن ثابت قال: بعثني ابو بكر عند رجوعه الى اهل الردة ان اقسام اموالهم بين ورثتهم المسلمين.

²⁹ Anwar Rosyidi, *et al.*, *op. cit.*, Juz X, hlm. 72.

Artinya: “Zaid bin Tsabit meriwayatkan Ia berkata: Ketika Abu Bakar rujuk kepada ahli murtad, Abu Bakar mengutusku membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim”.³⁰

Atsar tersebut dijadikan sebagai istimbath hukum dalam membolehkan mewarisis harta orang murtad oleh Abu Hanifah, karena Atsar tersebut secara langsung membolehkan orang Islam mewarisi harta orang murtad.

Dari keterangan di atas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya kepada ayat di atas, bahwa orang Islam menerima harta waris dari muwarrits murtad itu diperbolehkan, karena menurut ayat tersebut adalah mempunyai hubungan kerabat atau hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, jadi ayat di atas dijadikan sebagai sumber hukum Abu Hanifah dalam membolehkan menerima harta waris dari muwaris murtad. Kemudian Abu Hanifah menggunakan Fatwa Sahabat yang isinya bahwa Abu Bakar menyuruh membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim, jadi harta orang murtad bisa diwarisi orang muslim. Sehingga ayat dan Atsar tersebut dijadikan dasar istimbath hukum tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad.

Dan Imam Abu Hanifah menggunakan ayat di atas (QS al-Ahzab ayat 6) dan Atsar (Fatwa Sahabat) dengan alasan tidak ada dalil-dalil baik al-Qur'an maupun Hadits masyhur yang mengkualifikasikannya sehingga beliau membolehkan menerima harta waris dari muwaris murtad.

³⁰ Ibnu Abidin, *loc. cit.*

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG KEBOLEHAN MENERIMA HARTA WARIS DARI MUWARIS MURTAD

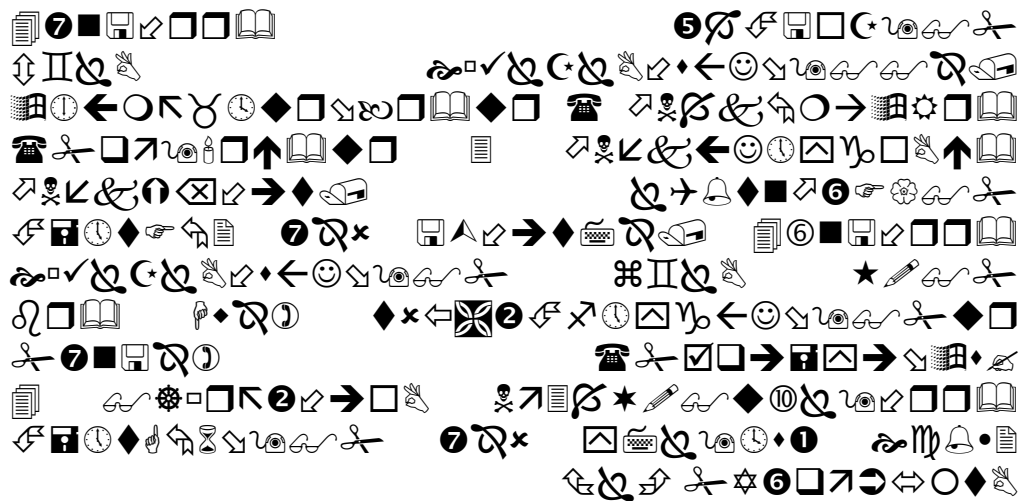
A. Analisis Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad

Istimbath merupakan sistem atau metode para ulama guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istimbath erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh tidak lain adalah ijihad para ulama dalam menentukan suatu hukum.

Nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Imam Abu Hanifah juga dalam mengambil hukum dari Al-Qur'an kemudian As-Sunnah. Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah Abu Hanifah menggunakan Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan dan Urf, dalam menentukan suatu hukum.

Berkaitan dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwarrits murtad, ternyata tidak semua metode-metode tersebut dipakainya melainkan hanya beberapa metode saja, diantaranya adalah : Nash Al-Qur'an, dan Atsar (fatwa sahabat).

Adapun istimbath hukum yang digunakan Abu Hanifah dalam pendapatnya membolehkan orang Islam menerima harta waris dari muwarrits murtad, diambil dari ayat Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi :



Artinya : “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”.(QS Al-Ahzab ayat 6).¹

Namun dalam ayat tersebut Imam Abu Hanifah lebih memfokuskan pada kalimat :



Artinya : “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) dalam kitab Allah”.

Maksud dari kata tersebut orang-orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak untuk mewarisi karena adanya hubungan persaudaraan nasab, dari pada orang mu'min yakni saudara seagama. Inilah ketentuan yang telah ditetapkan dan difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya.

Sesungguhnya ayat ini mengembalikan berbagai macam perkara kepada alur yang sebenarnya, dan ia membatalkan suatu hukum yang

¹Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 1981, hlm. 334.

disyari'atkan dalam keadaan darurat yang bersifat isidentil, yaitu menerima warisan karena saudara seagama, persaudaraan karena hijrah diantara orang Muhajirin dan Ansar yang hal ini mengakibatkan saling mewarisi diantara kedua golongan, seorang Muhajirin dapat mewarisi seorang Ansar, sedangkan keluarga orang Ansar dan family-familynya tidak dapat mewarisinya.²

Menurut ayat ini hubungan kerabat atau hubungan nasab itu lebih berhak mendapat warisan dari pada orang mu'min, sehingga Abu Hanifah membolehkan orang Islam menerima harta waris dari muwarrits murtad, karena orang Islam tersebut mempunyai hubungan darah dengan orang murtad meskipun beda agama.

Kemudian dalam surat al-Anfal ayat 75, juga diterangkan bahwa hubungan kerabat lebih berhak saling mewarisi.



Maksud dari ayat di atas bahwa Ulu 'l-Arham : kaum-kerabat dan orang-orang yang mempunyai hubungan silaturahmi : bentuk jama' dari rahmun, asalnya adalah rahim wanita, yakni tempat pembentukan janin. Kaum kerabat dinamakan demikian karena mereka berasal dari satu rahim.

Yakni : kaum kerabat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak dari pada kaum Muhajirin dan Anshar untuk saling menolong dan saling mewarisi di negeri hijrah pada masa itu dan setiap masa. Fi kitabihi, berarti di dalam hukum yang telah ditetapkan Allah bagi para hamba-

² Anwar Rosyidi, *et al.*, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz XXI, Semarang : CV Thoha Putra, 1989, hlm. 247.

Nya yang Mu'min, dan dengan itu Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengadakan hubungan silaturrahim serta memberikan wasiat kepada dua orangtua dan kaum kerabat.³

Abu Hanifah berpendapat orang murtad itu bisa diwarisi hartanya oleh ahli warisnya yang Islam karena ayat tersebut menyebutkan bahwa yang lebih berhak mewarisi karena adanya hubungan kerabat dari pada orang-orang mu'min. Dalam artian meskipun beda agama (antara muwarrits dengan ahli waris) itu lebih berhak mewarisi dari pada ahli waris yang lain. Sehingga Abu Hanifah menggunakan ayat tersebut sebagai istimbath hukum dalam menentukan kebolehan orang Islam mewarisi harta orang murtad.

Menurut penulis bukan berarti ayat tersebut membolehkan mewarisi beda agama (orang Islam bisa menerima harta waris dari muwarrits murtad), ayat tersebut mengutamakan kepada kerabat dekat atau hubungan nasab yang lebih berhak mewarisi dari kerabat yang lain jadi tetap harus seagama dalam hal mewarisi.

Menurut Imam syafi'I, Imam Malik dan Imam Hambali, orang murtad tersebut tetap dianggap kafir karena telah keluar dari agama Islam sehingga ahli warisnya yang Islam tidak dapat mewarisi hartanya, dan harta tersebut ditetapkan menjadi harta fai'. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.

³Anwar Rosyidi, *et al.*, *Terjamah Tafsir Al-Maragi*, Juz X, Semarang : CV Thoah Putra, 1989, hlm. 72.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَو بْنِ
عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه ابو داود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kita Musaddad. Telah menceritakan kepada kita Sufyan, dari al-Zuhriy dari Ali ibn Husain dari Umar ibn Utsman dari Usamah ibn Zaid, dari Nabi SAW. orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.” (HR. Abu Dawud).⁴

Dan diperkuat Hadits riwayat Ahmad, al-Arba’ah, dan Turmizdi :

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث
اهل الملتين شتى. (رواه احمد والاربعة والترمذى)

Artinya : “Dari Abdullah Ibn Umar r.a., ia berkata Rasulullah bersabda: Tidak akan waris-mewarisi antara pemeluk dua Agama” (H.R. Ahmad, al-Arba’ah dan at-Turmuzi).⁵

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 surat al-Nisaa’

sebagai berikut :



Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang mukmin” (QS. al-Nisaa’: 141).⁶

Menurut penulis orang Islam tidak bisa menerima harta waris dari muwarrits murtad, karena sudah ada Hadits yang menyatakan perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi.. Jadi menurut penulis ayat tersebut kurang pas jika dijadikan istimbath hukum dalam menentukan kebolehan orang

⁴ Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’atau, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 334.

⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 404.

⁶ Depag RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 1981. hlm. 80.

Islam mewarisi harta orang murtad, karena ayat tersebut di nasakh oleh hadis di atas.

Dan di dalam al-Qur'an diterangkan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Dengan adanya ayat tersebut telah jelas bahwa beda agama menjadi penghalang mewarisi. Yaitu tidak ada waris mewarisi antara orang muslim dengan orang kafir.

Dan Atsar (Fatwa Sahabat) yang digunakan sebagai istimbath hukum Imam Abu Hanifah tentang kebolehan mewarisi harta orang murtad :

روى زيد بن ثابت قال: بعثني ابو بكر عند رجوعه الى اهل الردة ان اقسام اموالهم بين ورثتهم المسلمين.

Artinya : “Zaid bin Tsabit meriwayatkan Ia berkata : Ketika Abu Bakar rujuk kepada ahli murtad, Abu Bakar mengutusku membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim”.⁷

Atsar tersebut dijadikan sebagai istimbath hukum dalam membolehkan mewarisi harta orang murtad oleh Imam Abu Hanifah, karena Atsar tersebut secara langsung membolehkan orang Islam mewarisi harta orang murtad.

Dari keterangan di atas telah jelas bahwa Imam Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya kepada ayat tersebut, bahwa orang Islam menerima harta waris dari muwarrits murtad itu diperbolehkan, karena menurut ayat tersebut adalah mempunyai hubungan kerabat atau hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, jadi ayat di atas dijadikan sebagai sumber hukum Abu Hanifah dalam membolehkan menerima harta waris dari

⁷ Ibnu Abidin , *Radd Al-Mukhtar*, Juz 10, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. hlm. 508.

muwaris murtad. Pendapat Abu Hanifah diqiyaskan dengan ayat tersebut bahwa kerabat orang yang murtad itu lebih utama daripada kaum muslimin karena mereka mendapatkan warisan dengan dua sebab yaitu keislam dan kekerabatan. Kemudian Abu Hanifah menggunkan Fatwa Sahabat yang isinya bahwa Abu Bakar menyuruh membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim, jadi harta orang murtad bisa diwarisi orang muslim. Sehingga ayat dan Atsar tersebut dijadikan dasar istimbath hukum tentang kebolehan orang Islam mewarisi harta orang murtad.

Dan Imam Abu Hanifah menggunakan ayat di atas (QS al-Ahzab ayat 6) dan Fatwa Sahabat dengan alasan tidak ada dalil-dalil baik al-Qur'an maupun Hadits masyhur yang mengkualifikasikannya sehingga beliau membolehkan orang Islam mewarisi orang murtad. Karena orang kafir dengan orang murtad itu beda, kalau kafir itu sejak semula sudah kafir atau tidak pernah Islam, sedangkan murtad itu dulunya pernah Islam jadi hadits Mutafaq alaih tentang orang Islam dengan orang kafir tidak dapat saling waris mewarisi, tidak bisa dijadikan sebagai dasar larangan orang Islam mewarisi harta orang murtad.

B. Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Menerima Harta Waris Dari Muwaris Murtad Relevansinya Dengan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat

Di dalam bab III telah dijelaskan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab Radd Al-Mukhtar, Hawi Al-Kabir, Fiqhul Islam Waadillatuhu dan Bidayatul Mujtahid, bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seorang

murtad mati atau dibunuh karena ke-riddahannya atau diputuskan oleh hakim bahwa ia telah menggabungkan diri kepada musuh, maka harta peninggalannya diperinci sebagai berikut:

1. Harta benda orang laki-laki murtad

- a. Harta benda yang didapat dikala Islamnya, sebelum ia murtad dan sesudah diambil untuk biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang dipusakai oleh ahli warisnya yang Islam. Sebab kematiannya disandarkan kepada waktu riddahnya itu dia sudah dapat dikenai pidana mati dan sekaligus ia disuruh untuk memilih antara taubat atau dibunuh. Dengan demikian ia sudah dapat dihukumi mati disaat mulai riddah. Disaat itu harta peninggalannya sudah dapat dipusakai oleh ahli waris yang mempunyai predikat “waris” diwaktu riddahnya.⁸
- b. Adapun harta benda yang didapat setelah riddahnya disetorkan kepada kas perbendaharaan Negara Islam, lantaran harta benda tersebut tidak ada yang memilikinya dan dianggap tidak ada ahli waris yang berhak mewarisi setelah riddahnya.⁹

2. Harta benda orang perempuan murtad

Bila orang murtad tersebut perempuan, maka kematiannya tidak disandarkan pada saat riddahnya, sebab ia tidak dikenakan pidana mati lantaran riddahnya, tetapi hanya dikenakan penjara saja. Oleh karena itu kematiannya dihitung ia sejak mati haqiqy, atau sejak diputuskan menggabungkan diri kepada musuh. Harta benda orang perempuan murtad

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-ma'arif, 1981, hlm. 103-104.

⁹ *Ibid.*

yang didapat sebelum mati haqiqy atau sebelum diputuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun harta benda itu diperoleh sesudah riddah diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.¹⁰

Dari pemaparan di atas bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan orang Islam menerima harta waris dari muwarris murtad, akan tetapi tidak semua bisa diwarisi, dan diperinci sebagai berikut : Bahwa bila muwarritsnya laki-laki harta yang bisa diwarisi adalah harta yang dihasilkan sebelum murtad akan tetapi jika hartanya yang dihasilkan setelah murtad itu merupakan harta fai' yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas perbendaharaan Negara (Baitul Mal). Jika muwarritsnya perempuan maka ahli warisnya yang muslim bisa mewarisi semua hartanya baik yang dihasilkan sebelum atau sesudah murtad.

Dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut jika kita kaitkan dengan pembagian waris dalam masyarakat itu relevan, karena dalam kenyataan meskipun muwarritsnya murtad dan ahli warisnya Islam tetap mendapat warisan. Karena kebanyakan masyarakat tidak memandang bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang mewarisi, justru dari masyarakat yang lebih menonjol adalah hubungan kerabat. Meskipun beda agama ahli waris yang Islam tetap mendapat bagian asalkan ada hubungan kerabat atau nasab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa ahli waris

¹⁰ *Ibid.*

beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris(ps.171 huruf c), untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam dalam pasal 172 menyatakan:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf *b*, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹¹

Karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit bahwa perbedaan agama antara ahli waris dengan pewarisnya menjadi penghalang mewarisi, sehingga masyarakat tidak memandang bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang mewarisi, justru dari masyarakat yang lebih menonjol adalah hubungan kerabat atau hubungan nasab. Karena dalam hukum adat yang berlaku hampir diseluruh daerah lingkungan hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan agama itu sebagai halangan mempusakai, kendatipun semua agama itu sama, kemudian salah seorang dari muwarrits dan warritsnya murtad.


Jadi dari pendapat Abu Hanifah relevan dengan kenyataan dalam masyarakat, tetapi tidak semua dari pendapatnya. Yang relevan adalah hanya orang Islam bisa menerima harta waris dari muwarrits murtad, yang tidak

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 404.

relevan dari pendapatnya adalah perbedaan antara muwarrist perempuan murtad dengan laki-laki murtad, Abu Hanifah membedakan kalau laki-laki murtad harta yang bisa diwarisi hanya harta yang dihasilkan sebelum murtad, dan kalau perempuan murtad semua hartanya bisa diwarisi ahli warisnya yang Islam, sehingga yang sesuai dalam masyarakat adalah semua hartanya bisa diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.


Akan tetapi dalam pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menerima harta waris dari muwarrits murtad dengan kriteria tertentu, dalam artian harus dilihat dari segi muwarritsnya laki-laki atau perempuan dengan ketentuan yang telah dipaparkan diatas, maka tidak relevan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena dalam masa sekarang ini seorang laki-laki tidak bisa dianggap telah menggabungkan diri kepada musuh, karena orang murtad sekarang tidak memerangi orang Islam, orang murtad baik laki-laki atau perempuan itu tetap sama saja, baik dia matinya haqiqy atau karena dibunuh, sehingga tidak bisa dipilah-pilah antara harta orang laki-laki murtad dengan orang perempuan murtad, karena harta benda setiap orang murtad yang didapat sebelum mati atau diputuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun hasil yang didapat setelah riddah bisa dimiliki ahli warisnya yang beragama Islam. Sebab kematian setiap orang murtad itu dihitung mulai waktu mati haqiqy atau diputuskan menggabungkan diri kepada musuh, bukan disandakan mulai sejak riddah. Jadi hartanya itu sama saja baik yang dihasilkan sebelum murtad dan setelah murtad.

Menurut penulis pendapat Abu Hanifah tidak sesuai bahwa orang Islam mendapat warisan dari orang murtad, karena salah satu syarat mendapat warisan adalah adanya hubungan agama atau seagama, di dalam Hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa: “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”, dari hadits itu jelas bahwa orang yang beda agama tidak dapat saling waris mewarisi. Karena setiap agama itu mempunyai tata aturan sendiri-sendiri jadi beda agama tidak bisa saling waris mewarisi. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Maidah : 48.



 Artinya : “Bagi setiap umat diantara kamu kami ciptakan suatu peraturan dan tata cara”.....dst.nya. (QS. Al-Maidah: 48).¹²

Dan dalam surat lain juga dijelaska bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang Islam.



 Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang mukmin.” (QS. an-Nisaa’: 141).¹³

Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa setiap agama mempunyai tata aturan sendiri-sendiri, sehingga orang yang berbeda agama (antara ahli waris dengan muwaris berbeda agama) tidak dapat saling mewarisi.

Nabi Muhammad SAW juga pernah mempraktekkan pembagian warisan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi, yaitu pada saat Abu Thalib, paman kesayangan beliau

¹² Depag RI, *op. cit.*, hlm. 92.

¹³ *Ibid.* hlm. 80.

meninggal dunia sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak yaitu ‘Uqail dan Thalib yang belum masuk Islam dan Ali serta Ja’far yang masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW. harta warisan diberikan kepada Uqail ibnu talib. Ini menunjukkan bahwa perbedaan agama, menjadi penghalang untuk bisa mewarisi.¹⁴

Akan tetapi menurut penulis harta orang murtad itu tidak bisa dipilah-pilah, baik harta laki-laki atau perempuan murtad itu sama saja tidak bisa dimiliki oleh ahli warisnya yang Islam, Namun penulis tidak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, karena salah satu syarat mendapat warisan adalah adanya hubungan agama atau seagama, di dalam Hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa: “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”, dari hadits itu jelas bahwa beda agama menjadi penghalang mewarisi. Dan di dalam al-Qur’an juga dijelaskan bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang mukmin, yang terdapat dalam surat al-Nisaa’ ayat 141. Maka ahli waris yang Islam tidak mendapat warisan. Dan harta tersebut ditahan semata-mata supaya dia kembali lagi kepada Islam.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 405.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Menurut Imam Abu Hanifah orang Islam bisa menerima harta waris dari muwaris murtad, apabila seorang murtad mati atau dibunuh karena ke-riddahannya, maka harta peninggalannya diperinci sebagai berikut :

- a. Harta benda orang laki-laki murtad

Harta benda yang didapat dikala Islamnya, sebelum ia murtad dipusakai oleh ahli warisnya yang Islam. Sebab kematiannya disandarkan kepada waktu riddahnya itu dia sudah dapat dikenai pidana mati dan sekaligus ia disuruh untuk memilih antara taubat atau dibunuh. Adapun harta benda yang didapat setelah riddahnya disetorkan kepada kas perbendaharaan negara Islam (baitul mal).

- b. Harta benda orang perempuan murtad

Bila orang murtad tersebut perempuan, maka kematiannya tidak disandarkan pada saat riddahnya,. Harta benda orang perempuan murtad yang didapat sebelum mati haqiqy atau sebelum diputuskan menggabungkan diri kepada musuh, walaupun harta benda itu diperoleh sesudah riddah diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.

2. Istimbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad adalah ayat Al-Qur'an dan Atsar (Fatwa Sahabat) yang berbunyi :



Artinya : “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) dalam kitab Allah”.

Kalimat tersebut terdapat dalam surat al-Anfal ayat 75, dan surat Al-Ahzab ayat 6.

روى زيد بن ثابت قال: بعثني ابو بكر عند رجوعه الى اهل الردة ان اقسام اموالهم بين ورثتهم المسلمين.

Artinya : “Zaid bin Tsabit meriwayatkan Ia berkata : Ketika Abu Bakar rujuk kepada ahli murtad, Abu Bakar mengutusku membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim”.

Menurut ayat ini hubungan kerabat atau hubungan nasab itu lebih berhak mendapat warisan dari pada orang mu'min, sehingga Imam Abu Hanifah berpendapat orang murtad itu bisa diwarisi hartanya oleh ahli warisnya yang Islam. Dalam artian meskipun beda agama (antara muwarrits dengan ahli waris) itu lebih berhak mewarisi dari pada ahli waris yang lain. Jadi ayat tersebut dijadikan sebagai istimbath hukum dalam menentukan kebolehan orang Islam mewarisi harta orang murtad.

Kemudian Imam Abu Hanifah menggunkan Fatwa Sahabat yang isinya bahwa Abu Bakar menyuruh membagikan harta orang murtad kepada ahli warisnya yang muslim, jadi harta orang murtad bisa diwarisi orang muslim. Sehingga Atsar (fatwa sahabat) tersebut dijadikan dasar istimbath hukum tentang kebolehan menerima harta waris dari muwaris murtad.

3. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa kerabat orang yang murtad itu lebih utama daripada orang muslim karena mereka mendapatkan warisan dengan dua sebab yaitu : keislaman dan kekerabatan. Sedangkan kaum muslimin menerima warisan hanya dengan satu sebab yaitu keislaman.
4. Namun penulis tidak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, karena salah satu syarat mendapat warisan adalah adanya hubungan agama atau seagama, di dalam Hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa: “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”, dari hadits itu jelas bahwa beda agama menjadi penghalang mewarisi. Kemudian menurut penulis harta orang murtad itu tidak bisa dipilah-pilah, baik harta laki-laki atau perempuan murtad itu sama saja tidak bisa dimiliki oleh ahli warisnya yang Islam, karena di dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang mukmin, yang terdapat dalam surat al-Nisaa' ayat 141. Maka ahli waris yang Islam tidak mendapat warisan. Dan harta tersebut ditahan semata-mata supaya dia kembali lagi kepada Islam

B. Saran-Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah tentang dibolehkannya orang Islam menerima harta waris dari muwarrits murtad, maka penulis menyampaikan beberapa saran demi kemaslahatan bersama, yaitu :

1. Hendaknya kita menyadari realitas zaman yang semakin cepat berubah dan maju serta modern, dimana syari'at Islam dengan segala aspeknya

dihadapkan pada persoalan-persoalan baru dan semakin modern sedangkan literatur kita dibidang hukum hampir semuanya adalah hasil karya ulama-ulama terdahulu yang sudah berbeda jauh kondisinya dengan keadaan sekarang, oleh karena itu untuk menjawab tantangan zaman yang berorientasi kekinian diperlukan untuk mengkaji kembali pendapat ulama-ulama terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang.

2. Namun perlu diingat bahwa syari'at Islam itu mempunyai nilai yang universal, oleh karena itu masih banyak khazanah intelektual Islam yang masih relevan dengan kondisi sekarang. Maka kita perlu berprinsip memakai prinsip lama yang masih relevan dan mengambil prinsip baru yang lebih baik.
3. Dengan mengadakan kajian ilmiah dan berfikir yang kritis analitis yang menjauhkan kita dari sikap fanatisme madzhab, dan akan memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendapat tentang hukum Islam.

C. Penutup

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini belumlah mencukupi dan jauh dari keterbatasan pengetahuan penulis. Maka penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. Penulis berserah diri, semoga skripsi yang disusun oleh penulis dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi masyarakat dan umat Islam pada umumnya, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asyamsuri, *et al.*, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta : Depag RI, 1986.
- Abidin, Ibnu, *Radd Al-Mukhtar*, Juz 10, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Al zuhaili, Wahhab, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Juz 8, Beirut : Dar Al-Fakru, tth.
- Ali Hasan, Muhammad, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta : INIS, 1991.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998.
- AS, Mudzakir, *Fiqh sunnah 14*, Bandung : Al-ma'arif, 1987.
- Ash Shiddieqi, Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Semarang : PT Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djaja, Tamar, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab*, Solo : CV Ramadhani, 1984.
- Djakfar, Idris, Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Hoeven, Van, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 2002.
- Husain bin Ali al-Baihaqi Abi Bakar Ahmad bin, *Sunan al-Kubro*, Juz 6, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ibn al-Hijaj al-Qusyairiyian Naisaburi Imam Abi al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Ibnu Hajar Al Asqalani Al Hafidh, *Bulugul Maram*, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995.
- K. Lubis Sahrawardi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : DDII Jakarta-Indonesia, 1972.
- Kholil, Munawar, *Biografifi Empat Serangkai Fiqh Imam Madzhab*, Jakarta : CV Bulan Bintang, 1965.
- M Amin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1976.
- Maruzi ,Muslich, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : Mujahidin, 1981.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Cet.ke-20, 2004.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al- Fiqh 'alaal- Madzahib al- Khamsah*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al- kaff, cet. II, Jakarta : Lentera, 2004.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2002.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin, *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri Abi Hasan Ali bin, *Hawi Al-Kabir*, juz 8, Beirut : Dar Al-Kutub, t.th.
- Muhammad Mahluf Husain, *Al-Mawaris fi Syari'at al-Islamiyah*, Mesir : al-Mathba'ah al-Madani, 1976.
- Muhammad Sattha al Dimmiyah al Bikri Abu Bakar Usman bin, *Ia-natut thoibin juz III*, Bairut : Dar Alkutub al Ilmiyah, t.th.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991.
- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1993.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, 1981.
- Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro, 1981.

———, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 166.

———, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002.

———, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-6, 2003.

Rosyidi, Anwar, *ed al., Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz XXI, Semarang : CV Thoha Putra, 1989.

———, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Juz X, Semarang : CV Thoha Putra, 1989.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, Terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sulaiman ibn al-As'atau Imam al-Hafidz Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 334.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-9, 1995.

Syarif Hidayatullah IAIN, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Departemen Agama, t th.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Syekh Hasan al-Hasan al-Kauhaji Syekh Abdullah bin, *Zadd al-Mukhtaj*, Juz 3, Beirut : Al-Maktabah al-Ashriyah, t.th.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1982.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahman

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 22 Februari 1986

Alamat Asal : Jl. Bongpes RT. 4, RW 1, Gerdu, Pecangaan, Jepara

Pendidikan : - SDN, Gerdu, lulus th. 1997

- MTS Walisongo Pecangaan, lulus th. 2000

- MA Walisongo Pecangaan, lulus th. 2003

- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan
2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arif Rahman